

SEJARAH STRATEGI PERLUASAN WILAYAH PRAJA MANGKUNEGARAN PADA MASA KEKUASAAN MANGKUNEGARA I & II

Oleh

Lucia Arter Lintang Gritantin

Universitas Negeri Khairun

Email: luciagritantin@unkhair.ac.id

Article History:

Received: 18-04-2023

Revised: 18-05-2023

Accepted: 22-05-2023

Keywords:

Mangkunegara I,
Mangkunegara II, Praja
Mangkunegaran, Strategi
Sejarah

Abstract: R.M. Said (Mangkunegara I), the founder of Praja Mangkunegaran (Dukedom Mangkunegaran) was famous for his persistent character and strong willingness to expand Dukedom Mangkunegaran's territory. He passed his disposition on to his successor, Mangkunegara II. These two figures have the same mission regarding territorial expansion. Having strong work ethics and integrity was seen as an added value by the Dutch East Indies Government. Therefore, the colonial government gave them many privileges, especially in regards to the granting and distribution of land. The author sees this phenomenon as an interesting research topic. Therefore, it is necessary to record steps and analyze strategies used by Mangkunegara I & II in expanding the territory of Dukedom Mangkunegaran

PENDAHULUAN

Perjuangan mendirikan dan mempertahankan sebuah Praja adalah proses yang tidak mudah dilakukan. Begitu pula dengan proses pendirian dan mempertahankan Praja Mangkunegaran. Sejak awal berdirinya Praja Mangkunegaran memiliki perjalanan sejarah yang penuh dengan perjuangan luar biasa. R.M. Said sebagai pendiri Praja Mangkunegaran sendiri memiliki karakter yang tidak mudah menyerah dan gigih, hal ini lah yang membuat sejarah berdirinya Praja Mangkunegaran menjadi lebih menarik untuk dibahas serta tentang bagaimana R.M. Said beserta keturunannya yaitu Mangkunegara II mempertahankan kekuatan dan kekuasaan Praja Mangkunegaran.

Sejak awal berdiri Praja Mangkunegaran memiliki pemimpin yang pemikirannya sangat maju dan cemerlang, terlebih dalam hal perluasan wilayah yang nantinya akan berdampak pada banyak hal seperti bidang ekonomi, sosial dan politik tentunya. Daya tawar dari Praja Mangkunegaran menjadikan Praja Magkunegara memiliki keistimewaan sendiri bagi Pemerintah Hindia Belanda. Mampu menyelesaikan tanggung jawab dan kesepakatan dengan baik, terlebih dalam hal bantuan perang di daerah – daerah kepada Pemerintah Hindia Belanda semakin membuat nama Praja Mangkunegaran istimewa. Hal – hal baik inilah yang perlu untuk dibahas menjadi sebuah karya yang memaparkan bagaimana strategi Praja Mangkunegaran di bawah kepemimpinan Mangkunegara I & II, mampu memperluas wilayah kekuasaan Praja Mangkunegaran.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian milik Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 2003)

yaitu Metode Penelitian Sejarah. Metode ini memiliki 5 tahapan antara lain:

1. Pemilihan topik: topik yang dipilih penulis adalah Sejarah Strategi perluasan wilayah yang dilakukan oleh 2 tokoh besar, yaitu: Mangkunegara I & II.
2. Heuristik: penulis mengumpulkan sumber – sumber penelitian dari arsip & dokumen Perpustakaan Mangkunegaran serta buku – buku terkait topik.
3. Verifikasi: tahap ini penulis telah melakukan seleksi sumber primer dan sumber sekunder.
4. Interpretasi: semua sumber primer & sumber sekunder telah disatukan sehingga menjadi kerangka tulisan.
5. Historiografi: jurnal ini adalah bentuk dari historiografi dari 4 rangkaian tahap sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keahlian Praja Mangkunegaran dalam menguasai beberapa tanah dan wilayah – wilayah yang subur tidak dapat lepas dari sejarah perjuangan dan perkembangan Praja Mangkunegaran dalam mewujudkan keinginan untuk dapat membangun basis ekonomi dan lahan berbisnis yang kuat. Maka perlu dilihat dalam proses sejarah berdirinya Praja Mangkunegaran. Dilihat dari sisi sejarah berdirinya sendiri Praja Mangkunegaran sendiri tidak pernah bisa lepas dari peristiwa besar tentang perpindahan Kerajaan Mataram Islam yang berpindah ke Kartasura. Peristiwa ini berawal dari adanya persoalan Mataram di Kartasura saat Sri Pakubuwono I masih menjadi Putra Mahkota, Ia memiliki putra yang bernama R.M. Surya yang sejak kecil diserahkan kepada adiknya yaitu Pangeran Purbaya. Pakubuwono I yang sangat bergantung kepada bantuan Kompeni menetapkan kebijakan baru yaitu kebijakan tentang: mengatur dan menata kembali kedudukan, kepangkatan, fasilitas dan tanda – tanda kepangeranan.

Kebijakan yang diambil tersebut juga berdampak kepada adik – adiknya yaitu Pangeran Purbaya dan Pangeran Blitar. Pangeran Purbaya dan Blitar diturunkan derajat kepangeranannya, yang mana apanage yang semula 100 *jung* dikurangi menjadi 75 *jung*. Namun hal tersebut diterima oleh Pangeran Purbaya demi ketentrama Keraton, akan tetapi berbeda dengan Pangeran Blitar yang menganggap perlakuan tersebut sebagai sebuah penghinaan. Pangeran Blitar menolak dan meninggalkan Kota Kartasura untuk melakukan perlawanan dan pada akhirnya Pangeran Purbaya pun juga ikut bergabung dengan gerakan Pangeran Blitar.

Pangeran Blitar mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang Sultan dan Pangeran Purbaya diangkat menjadi Panglima Perang. Sementara Pangeran Surya diangkat menjadi Putra Mahkota dan diberi gelar Pangeran Arya Mangkunegara. Adanya hal tersebut membuat Pakubuwono I mengambil keputusan untuk meminta bantuan VOC¹ guna membantu dalam pengempuran pasukan Pangeran Blitar. Namun dalam pertempuran tersebut Pangeran Blitar gugur, sedangkan Pangeran Arya Mangkunegara dibawa kembali ke Kartasura karena Pakubuwono I merasa sudah tua Ia ingin agar segera digantikan oleh putra sulungnya Pangeran Arya Mangkunegara.

¹ Vereenigde Oostindische Compagnie yang berarti Perserikatan Perusahaan Hindia Timur, yang didirikan pada 20 maret 1602. (CR Boxer, Jan Kompeni. Sejarah VOC dalam Perang dan Damai Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm 9)

Permaisuri Sri Susuhunan Purba yang bernama K.Ratu Wetan yang dibantu oleh Patih Danureja berkeinginan untuk mengangkat putranya yang masih muda menjadi Raja. Setelah pengangkatan dan pelantikan putra K. Ratu Wetan menjadi seorang Raja, kemudia Pangeran Arya Mangkunegara diangkat menjadi penasehat Raja. Setelah menjadi penasehat Raja, Pangeran Arya Mangkunegara kemudian ditangkap oleh VOC dan dibawa ke Batavia guna diasingkan ke Ceylon setelahnya berlanjut ke Afrika Selatan. Pengasingan tersebut terjadi karena adanya fitnah yang direkayasa Patih Danureja (Siswokartono Soetomo, 2006, 25-26). Adanya peristiwa ini membuktikan bahwa keadaan di dalam istana merupakan keadaan yang tidak menentu meskipun sudah bergelar seorang Raja sekalipun. Dengan demikian sebuah kedudukan merupakan sebuah kebutuhan bagi golongan tertentu. Karena itulah berbagai cara dilakukan untuk selalu mengabsahkan kedudukannya. Kekawatiran akan adanya penggeseran menjadi bukti bahwa sebuah kekuasaan dan kedudukan sangat menghantui beberapa golongan penghuni istana (G. Moedjanto, 1987, hlm. 38-39).

Berjalannya waktu setelah Arya Mangkunegara diasingkan, Sri Susuhunan Paku Buwono II dianggap banyak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Tindakan – tindakan ini menjadi faktor muncul dan terbentuknya kelompok-kelompok para Putra Pangeran atau Pejabat Kerajaan yang kurang menyukai tindakan sewenang – wenang tersebut untuk melakukan kesepakatan guna melawan tindakan – tindakan sewenang – wenang dan ketidak adilan yang dilakukan oleh Sri Susuhunan Paku Buwono II beserta VOC. Tindakan yang diambil adalah dengan cara meninggalkan Kota Raja Kartasura. Sementara itu, Adipati Martapura yang bergelar Sunan Kuning justru mampu merebut dan menduduki Keraton Kartasura. Sedangkan Sri Susuhunan Pakubuwono II sendiri diselamatkan VOC dan dibawa lari ke Panaraga oleh Capten J.A.B. Van Hohendorff.

Namun tak lama dari peristiwa pendudukan oleh Sunan Kuning, Sri Susuhunan Paku Buwono II mampu merebut kembali Kartasura dari tangan Adipati Martapura yang dibantu oleh R.M. Said dan saudara-saudaranya. Walaupun ikut membantu mengusir tentara pemberontak Cina namun setelah selesai R.M Said tidak memperoleh penghargaan yang layak. Oleh karena merasa kecewa akhirnya Ia meninggalkan Kartasura lagi dan diikuti oleh 18 Putra Pejabat yang merasa dikecewakan. Dengan dukungan 18 pengikutnya R.M Said mulai melancarkan perlawanan terhadap Sri Susuhunan Paku Buwono II dan VOC. R.M Said sendiri mengangkat 18 pengikutnya tersebut menjadi pimpinan – pimpinan prajurit inti yang menjadi andalan perjuangan serta diberikan gelar baru.

Pada saat Sri Susuhunan Pakubuwono II kembali ke Keraton Kartasura keadaan Keraton sudah rusak. Menurut kepercayaan Jawa jika sebuah Keraton rusak karena pernah diduduki musuh maka Keraton tersebut sudah tidak layak untuk dihuni lagi. Sri Susuhunan Pakubuwono II kemudian memindahkan Keraton ke tempat lain dan saat itu dipilihlah Desa Sala sebagai pengganti Keraton Kartasura yang sudah rusak. Sri Susuhunan Paku Buwono II kemudian mulai menempati Keraton baru tersebut di Surakarta Hadiningrat. Akibat dari perjanjian antara pihak Pemerintah Belanda dan Sri Susuhunan Paku Buwono II mengenai penyempurnaan isi perjanjian pada tahun 1743 ², maka R.M Said dan Pangeran Mangkubumi

² Isi dari perjanjian tersebut antara lain (1) Tegal dan Pekalongan diserahkan kepada Belanda sebagai daerah jajahannya, (2) bea atau cukai di daerah hulu dan bea angkutan barang sepanjang jalan sungai di Mataram ditarik oleh Kompeni Belanda, (3) bea keluar masuk di seluruh Kerajaan diserahkan dan diatur oleh Kompeni Belanda, antara lain : (a) bea di Kali Solo (b) bea di pasar-pasar (c) bea tembakau di Kedu (d) hak menjual dan hak memungut sarang burung, (4) untuk itu semua Sri Susuhunan akan menerima biaya-biaya

memiliki alasan melakukan perlawanan terhadap Sri Susuhunan Paku Buwono II dan VOC.

Selanjutnya ketika Sri Susuhunan Paku Buwono II sedang dalam keadaan sekarat, Beliau "didesak" oleh Pemerintah Belanda untuk menandatangani suatu perjanjian. Sri Susuhunan Pakubuwono II wafat pada tahun 1749, seperti perjanjian dengan Pemerintah Belanda bahwa Putra Mahkota diangkat dengan Gelar Sri Susuhunan Paku Buwono III sebagai pengganti Ayahandanya pada 15 Desember 1749. Putra Mahkota mengakui bahwa Ia menjadi Raja tidak lewat pewarisan tetapi karena VOC menunjuknya untuk menduduki jabatan tersebut (Siswokatono Soetomo, 2006, hlm. 31-32). Posisi tawar kuat yang dimiliki oleh Pemerintah Belanda saat itu membuat Belanda mampu mengatur kedudukan di dalam istana yang mana membuat hal tersebut menjadi lain dari biasanya dalam hal pengangkatan Raja. yang mana biasanya pengukuhan seorang Raja hanya bisa dilakukan oleh seorang yang dianggap sebagai seorang Sesepuh yang berpengaruh, yang dihormati atau seseorang yang disegani oleh banyak orang.

Dahulu sebelum VOC ikut campur dalam urusan dan kekuasaan suatu kerajaan para Sesepuh dapat menjadi payung pelindung bagi Raja. Namun kemudian VOC mengambil alih hal tersebut. Ini berarti pada tahun 1749 Raja Mataram , Paku Buwono III dinobatkan oleh Gubernur Semarang Hartingh atas nama VOC. (Moejdanto G, 1987, hlm. 39). Sehingga dapat dilihat betapa tergantungnya Kerajaan Mataram terhadap VOC bahkan sampai masalah pengukuhan kekuasaan hingga pelimpahan kekuasaan harus mengalami campur tangan dari pihak VOC.

Adanya perpecahan yang terjadi antara Pangeran Mangkubumi dan R.M Said yang diakibatkan oleh sebuah salah paham mengakibatkan medan berperangan menjadi segitiga antara pihak pertama kubu Magkubumi, kedua adalah kubu R.M Said dan ketiga kubu gabungan Pemerintah Belanda dan Keraton Surakarta. Pada tahun 1753, diadakan lagi perundingan antara R.M Said dengan pihak Pemerintah Belanda namun perundingan tersebut gagal karena pihak Pemerintah Belanda merasa bahwa R.M Said dianggap memainkan kartunya terlalu tinggi.

Pada 11 april 1754 Von Hohendorff digantikan oleh Nicholas Hartingh. Nicholas mencoba mendekati Pangeran Mangkubumi dengan perantara seorang peranakan Arab. Dalam pesan yang dibawa perantara tersebut Pemerintah Hindia Belanda ingin menawarkan dua hal, yaitu:

1. Akan mengakui kedaulatan Pangeran Mangkubumi atas daerah – daerah yang telah diduduki sekarang.
2. Kedaulatan itu disertai kedudukan sebagai Putra Mahkota (Siswokatono Soetomo, 2006, hlm. 30)

pertemuan yang berlangsung pada 22 september 1754 tersebut dipercepat karena Pemerintah Hindia Belanda sedang memperoleh tekanan militer dari pasukan R.M Said, sehingga diputuskan bahwa akan mengakui Pangeran Mangkubumi atas separuh Kerajaan.

Pangeran Mangkubumi memperoleh kedudukannya sebagai Sultan dengan gelar Hamengku Buwono I. Setelah perjanjian tersebut maka tentara Sultan diminta untuk menggempur tentara menantunya sendiri yaitu R.M Said. Pemerintah Hindia Belanda sendiri

yang jumlahnya sudah ditentukan oleh Kompeni sebagai pengganti pemungutan sebesar 9.000 real, (5) Kompeni Belanda mengakui Putra Sri Susuhunan Paku Buwono II, yang ditunjuk sebagai penggantinya. lihat: Siswokatono, 2006 hal 30 .

masih terus mengusahakan adanya perdamaian. Namun karena R.M Said terus meminta kekuasaan atas seluruh Kerajaan, maka perundingan tersebut gagal dan perang masih terus berkobar. Karena dalam kebijakannya Nicholas Hartingh pada hakekatnya masih belum mampu untuk membinasakan R.M Said, maka untuk berdamai dengan Sri Susuhunan, Beliau dibujuk dengan janji. Dalam janji tersebut apabila Sri Susuhunan mangkat permintaan R.M Said akan dipenuhi. Walaupun dengan setengah hati, R.M Said mengutus adiknya yaitu Pangeran Timur untuk menghadap Susuhunan.

Adanya 2 tuntutan yang kembali dikemukakan, yaitu:

1. Tanah Jawa hendaknya diperintah oleh satu Raja.
2. Apabila tidak mungkin, Ia hanya menuntut daerah Laroh, Meteseh, Keduwang, dan Pacitan, untuk keperluan hidupnya.

Tuntutan pertamanya tidak diterima karena sudah terlanjur kerajaan dibagi dua, namun tuntutan kedua R.M Said dipenuhi. Dalam pertemuan di Salatiga 17 maret 1757 akhirnya terciptalah perdamaian dan R.M Said diangkat menjadi Pangeran Miji, beliau mendapatkan hak tanah sebesar 4000 *karya*. Sejak tanggal tersebut maka lahirlah sebuah Negara kecil yang disebut dengan Mangkunegaran, sebuah Nagari setingkat Kadipaten (Siswokatono Soetomo, 2006, hlm.35-37). Sedangkan pembagian tanah *lungguh* R.M Said sebesar 4000 *karya* terletak di separuh di *Mancanegara* (Kaduwang) sehingga tanah tidak tebagi-bagi. Sedangkan separuh tanah lainnya terdapat di Matesih, Lahor, dan Gunung Kidul.

Tabel 1. Tabel Pembagian Tanah

Nama Daerah	Luas Tanah (<i>lung</i>)
Kaduwang	141
Lahor	115,25
Matesih	218
Wiroko	60,50
Gunung Kidul	71,50
Ariboyo	82,50
Honggobayan	25
Sembuyan	133
Pajang Selatan	58,50
Pajang Utara	64,75
Mataram	1
Kedu	8,50
Jumlah	979,50

Sumber: G.P Rouffaer, *Vorstenladen* volume 34 seri D nomor 80, Reksopustoko, Surakarta, 1987, hlm.6

Sepanjang perjalanan karirnya, Mangkunegara I merupakan kekuatan ketiga yang paling akomodatif terhadap kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Sikap ini diambil karena pada mulanya posisi Mangkunegaran yang paling lemah dibandingkan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta di mata Pemerintah Hindia Belanda. Namun pada saat Raden Mas Said diangkat menjadi Mangkunegaran I, terdapat ketidak pastian apakah keturunannya akan dapat meneruskan kekuasaanya. Selain itu, secara politik kekuasaan Praja Mangkunegaran hanya sebagai Adipati jauh lebih lemah dibandingkan dengan Kasunanan. Sedangkan pada sisi lain Mangkunegara I sendiri juga memiliki sikap-sikap yang cukup baik dalam menjalankan pemerintahannya. Beberapa sikap kepemimpinan yang dapat diteladani oleh

rakyatnya antara lain:

1. Beliau tidak hanya memberi perintah pada bawahan tapi juga ikut menangani dan meneladani langsung
2. Rajin, tekun bekerja dan tidak mudah putus asa. Para *Narapraja* dan prajurit Mangkunegaran diupayakan terpenuhi kebutuhan pokoknya yaitu: pangan, sandang, papan.
3. Pada masa paceklik setiap hari Mangkunegara I membagi – bagikan pangan antara lain berupa ketupat pada masyarakat kecil di pasar *legi* dan pasar *pon*.
4. Perbaikan hidup para petani diusahakan dengan pembuatan bendungan – bendungan, sehingga air sungai dapat untuk mengairi sawah.
5. selain sebagai seorang prajurit andalan ia juga seorang seniman yang berkepribadian kuat. Sebagai buktinya dalam menghadiri pertemuan resmi, pangeran Mangkunegara I tetap menggunakan pakaian adat jawa, yaitu dengan ikat kepala dan kain walaupun Suan Pakubuwono, Para Pangeran dan pembesar lain berpakaian seperti orang Belanda.
6. Ia memiliki keahlian dalam seni karawitan ia senang memukul gamelan.
7. Pangeran Mangkunegara I menyelenggarakan kegiatan yang dilakukan para punggawa antara lain kegiatan mengendarai kuda, pendidikan kesusilaan.

Munculnya masalah yang disebabkan oleh ketidak pastian apakah keturunannya akan dapat meneruskan kekuasaanya tersebut dan dalam sisi politik kekuasaan Mangkunegaran sendiri hanya sebagai Adipati yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan Kasunanan, namun disinilah muncul sikap akomodatif dari Mangkunegara I yang dapat dipahami. Bahkan pada tahun 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Daendels, Mangkunegaran II membentuk "*Legiun Mangkunegara*" yakni 1150 orang prajurit yang terdiri atas pasukan *infanteri, kavaleri dan artileri* yang dibiayai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Mangkunegaran II sendiri mendapatkan pangkat Kolonel dan diberi 10.000 *ryksdaalders* lebih disetiap tahunnya sebagai gaji. *Legium* ini nantinya akan banyak melaksanakan tugas membantu Pemerintah Hindia Belanda yang salah satu diantaranya adalah tugas dalam penyerangan Yogyakarta tahun 1812, Perang Diponegoro tahun 1825 - 1830, dan Perang Aceh tahun 1873 - 1874 (Ricklefs, 2005, hlm. 244 - 245).

Keterlibatan Mangkunegaran dalam membantu Pemerintah Hindia Belanda dalam beberapa perang menyebabkan posisi tawar politik Mangkunegaran menjadi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan Mangkunegaran merasa tidak lebih rendah dari pada Kasunanan kecuali dalam hal gelar (Moedjanto, 1994, hlm.32). Meskipun Mangkunegaran tidak lebih tinggi dalam hal gelar, di sisi lain terdapat kenyataan bahawa Kasunanan Surakarta yang tidak pernah terjun dalam bidang bisnis. Hal ini berbeda dengan Mangkunegaran yang mana sejak awal berdirinya telah mempunyai visi tentang berbisnis dengan cara mengembangkan perkebunan komoditi ekspor.

Dalam jejak sejarahnya sendiri Pemerintah Hindia Belanda memang sudah berbaik hati kepada pemerintahan Mangkunegaran hal ini dapat dilihat dari perbandingan perbedaan perlakuan yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada Kasunanan dengan Mangkunegaran. Perbedaan tersebut antara lain terlihat pada saat pemberian tanah, Mangkunegaran II mendapatkan tanah dari Pemerintah Hindia Belanda seluas 500 *Jung*. Sedangkan di sisi lain Pemerintah Hindia Belanda justru meminta tanah kepada Kasunanan.

Hal lain yang bisa dilihat adalah mengenai kenyataan bahwa adanya perluasan wilayah Praja Mangkunegaran.

Pada tahun 1757 daerah Mangkunegaran mendapatkan perluasan wilayah yang mana luasnya 4000 *cacah* yang diterima dari Sultan. Sedangkan pada tahun 1813 Mangkunegaran mendapatkan tambahan tanah dari Raffles sebanyak 1000 *cacah* dan pada tahun 1830 mendapatkan kembali tanah sebanyak 500 *cacah*. Sehingga semunya menjadi 5500 *cacah*. (G.P.Rouffaen berjudul: *vorstelanden*). Dengan adanya penambahan ini maka ada banyak perubahan luas wilayah pada saat pemerintahan Mangkunegara II. Hal ini juga memunculkan kenyataan baru bahwa dengan mendapat tambahan tanah dari Raffles maka hal tersebut menyebabkan wilayah Mangkunegaran menjadi lebih terpecah (Warsino 2000, hlm. 14).

Semakin bertambahnya luas wilayah dan jumlah tanah yang dimiliki oleh Mangkunegaran menyebabkan pemerintahan Mangkunegaran menjadi lebih berpengaruh. Wilayah – wilayah hibah yang didapatkan juga berada di wilayah – wilayah yang memiliki tanah yang subur. Contohnya seperti tanah disekitar wilayah Lembah Sungai Bengawan Sala. Namun ada beberapa wilayah yang tanahnya masih berada di dalam administrasi Kasunanan dan Sultan, sehingga perlu diadakan saling tukar wilayah untuk mempermudah kontrol administrasi bagi daerah tersebut dan peristiwa saling tukar tanah tersebut berlangsung sepanjang tahun 1831 (Warsino 2000, hlm. 15).

KESIMPULAN

Praja Mangkunegaran memiliki pendiri sekaligus pemimpin yang sangat faham dengan apa yang telah direncanakan, bahkan sebelum pembuatan Praja Mangkunegara. Strategi yang sangat baik banyak diterapkan dan dilaksanakan dengan seksama. Begitu pula dengan penerusnya, Mangkunegara II yang juga memiliki integritas baik dalam menjaga nama baik Praja Mangkunegaran. Etos kerja dan jalinan kerjasama yang sangat baik antara Praja Mangkunegara sendiri dengan Rakyat dan Pemerintah Hindia Belanda membuat banyak kemajuan terjadi di selama pemerintahan Mangkunegara I dan II.

Terus menjalin hubungan baik dengan menjaga kepercayaan kepada Pemerintah Hindia Belanda adalah salah satu strategi yang baik. Dengan adanya kepercayaan yang tinggi dari Pemerintah Hindia Belanda membuat Praja Mangkunegaran memiliki keistimewaan tersendiri di mata Pemerintah Hindia Belanda, sehingga banyak kerjasama yang dilakukan untuk membantu pihak Pemerintah Hindia Belanda dalam perang di daerah – daerah yang bisa terselesaikan dengan baik, sehingga Pemerintah Hindia Belanda merasa puas dengan hasil kerja Praja Mangkunegaran.

Selain hubungan antara Pemerintah Hindia Belanda yang baik, Praja Mangkunegaran juga memiliki hubungan yang sangat baik pula dengan rakyatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tindakan Mangkunegara I & II yang selalu ingin mensejahterakan rakyatnya. Mangkunegara I bahkan ikut terjun langsung setiap harinya ke dalam masyarakat saat terjadi masa paceklik. Beliau membagi – bagikan pangan antara lain berupa ketupat pada masyarakat kecil di pasar *legi* dan pasar *pon*. Kemampuan Mangkunegara I & II sebagai pemimpin yang sanggup merangkul dan masuk ke dalam segala kalangan, membuat Praja Mangkunegaran mengalami banyak kemajuan baik yang mana salah satunya adalah perluasan wilayah kekuasaan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

1. Ucapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan YME atas segala berkah dan karunia yang telah diberikan kepada saya selama melakukan penulisan jurnal ini, sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Terimakasih kepada Ibu dan Suami saya yang selalu mendukung dalam setiap penelitian dan penulisan jurnal yang saya lakukan sehingga jurnal dengan judul: SEJARAH STRATEGI PERLUASAN WILAYAH PRAJA MANGKUNEGARAN PADA MASA KEKUASAAN MANGKUNEGARA I & II dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- [1] CR Boxer, 1983, *Jan Kompeni. Sejarah VOC dalam Perang dan Damai*, Sinar Harapan, Jakarta.
- [2] G.P Rouffaer, 1987, *Vorstenladen volume 34 seri D nomor 80*, Reksopustoko, Mangkunegaran.
- [3] Kuntowijoyo, 2003, *Metodologi Sejarah*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- [4] Lucia Arter Lintang Gritantin, 2010, *Strategi Politik Ekonomi Mangkunegara IV Kasus Pabrik Gula Colo Madu*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- [5] Moedjanto, 1994, *Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman: tinjauan historis dua praja kejawen antara 1755 - 1992*, Kanisius, Yogyakarta.
- [6] Moejdanto G, 1987, *Konsep Kekuasaan Jawa*, Kanisius, Yogyakarta.
- [7] Ricklefs, 2005, *SEJARAH INDONESIA MODERN 1200 – 2004*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- [8] Siswokatono Soetomo, 2006, *Sri Mangkunegara IV Sebagai Penguasa dan Pujangga (1853-1881)*, Aneka Ilmu, Semarang.
- [9] Warsino, 2006, *Tanah, Desa, dan Penguasa Sejarah Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Di Pedesaan Jawa*, UNNES PRESS, Semarang.